

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ali, Zainuddin, 2008, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Budiharjo, Miiriam, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Friedman, Lawrence M, 1984, *American Law*, W.W. Norton and company, New York
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta
- Jahja, Juni Sjafrin, 2012, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Mahmud Marzuki, Peter, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Manthovani, Reda dan Narendra Jatna, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, CP. Malibu, Jakarta
- Moeljatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Nogi S, Hesel dan Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, YPAPI dan Lukman Offset, Yogyakarta
- O.S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta
- Pramono, R. Widyo, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung
- _____, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Persepektif Jaksa Dan Guru Besar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Salman, Otje dan Susanto, 2015, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul Dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Setyardjo, Pradhana Probo dan Muhammad Al-Asyhari, 2019, *Menjegal Koruptor Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pertarungan Politik Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Jakarta
- Siahaan, Monang, 2017, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- _____, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Pembangunan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Suratman, Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- S.W. Sumardjono, Maria, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian dan Tesis*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta
- Zainal Abidin, Said, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta

B. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

- Hariato, Teguh, 2008, *Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muib, 2017, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- R. Harwiyadi, 2017, *Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Penganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Yahya, Bettina, 2017, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

C. Internet

- Fian, 2018, Kasus Dihentikan, Direksi Perusda 2014-2016 Gagal Nginap di Hotel Prodeo, *harapanrakyatonline.com*, Natuna, diakses 20 Desember 2020
- Glosarium, 2016, Aparat Penegak Hukum, <https://www.kamusbesar.com/aparat-penegak-hukum>, diakses 09 Januari 2020
- Hadi, Ilman, 2018, Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum/>, diakses 08 Januari 2020
- Humas MenpanRB, 2018, Cegah Korupsi, Pemerintah dan KPK Sepakat Perkuat APIP Daerah, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cegah-korupsi-pemerintah-dan-kpk-sepakat-perkuat-apip-daerah>, diakses 08 Januari 2020
- Imran, Ali, 2014, Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, <https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 20 Juni 2019
- Inspektorat Daerah Kulon Progo, 2018, Tugas APIP dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa, <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/article-1147-tugas-apip-dalam-mengawal-pengadaan-barang-dan-jasa.html>, diakses 08 Januari 2020
- Jata Ayu Pramesti, Tri 2015, Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup--dan-contoh-diskresi/>, diakses 04 Mei 2020
- Jayani, Dwi Hadiya, 2019, Sepanjang 2018 Terdapat 454 Kasus Penindakan Dugaan Korupsi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454-kasus-penindakan-dugaan-korupsi>, diakses 13 Januari 2020
- Rahmi, Novriza, 2017, APIP Sang Pengawas Bukan Bagian Mata Rantai Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5988456348404/apip-sang-pengawas--bukan-bagian-mata-rantai-korupsi/>, diakses 20 Februari 2020
- Syamsudin, Amir, 2017, Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/20153701/putusan.mk.dalam.penegakan.hukum.korupsi?page=all>, diakses 9 Februari 2020.

Umar, PA, 2013, Sop Penanganan Pengaduan Masyarakat, <http://nuswantorotejo.blogspot.com/2013/04/sop-penanganan-pengaduan-masyarakat.html#.Xha0574zbiU>, diakses 08 Januari 2020

Wikipedia, 2019, Kebijakan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses 21 Juni 2019

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

E. Lampiran

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan
Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak
Pidana Korupsi, 2018.